

PARADIGMA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

Dr. Ir. Samuel Th. Salean, M. Si¹

¹ Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik
Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan manajemen tata ruang, persepsi pengelolaan ruang dan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang terhadap efektivitas penataan ruang terbuka hijau di wilayah DKI Jakarta. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan pendekatan kausal. Penelitian ini menggunakan teknik Cluster Random Sampling pada birokrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Timur, total sampel sebanyak 60 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengetahuan manajemen tata ruang dan persepsi pengelolaan ruang berpengaruh positif terhadap pengawasan penyelenggaraan penataan ruang; dan (2) Pengetahuan manajemen tata ruang, persepsi pengelolaan ruang dan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang berpengaruh positif terhadap efektivitas penataan ruang terbuka hijau. Jadi efektivitas penataan ruang terbuka hijau dapat ditingkatkan melalui peningkatan pengetahuan manajemen tata ruang, persepsi pengelolaan ruang dan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang.

Kata kunci: Paradigma, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan, Wilayah Pesisir.

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir yang merupakan sumber daya potensial di Indonesia adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Sumber daya ini sangat besar yang didukung oleh adanya garis pantai sepanjang sekitar 81.000 km (Dahuri *et al.* 2001). Garis pantai yang panjang ini menyimpan potensi kekayaan sumber alam yang besar. Potensi itu diantaranya potensi hayati dan non hayati. Potensi hayati misalnya: perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang, sedangkan potensi nonhayati misalnya: mineral dan bahan tambang serta pariwisata. Di daerah ini juga berdiam para nelayan yang sebagian besar masih prasejahtera. Keadaan pantai di Indonesia sangat bervariasi, yaitu mulai dari pantai pasir putih-berbatu, landai-terjal, bervegetasi-berlumpur, teduh, bergelombang yang semua ini sangat cocok dengan berbagai peruntukannya, seperti perikanan pantai, budidaya perikanan, industri perhotelan, turisme, dan lain-lain.

Pengelolaan berbasis masyarakat atau biasa disebut *Community-Based Management* (CBM) menurut Nikijuluw 1994 dalam Zamani dan Darmawan 2000, merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya alam, misalnya perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolannya. Selain itu, mereka juga memiliki akar budaya yang kuat dan biasanya tergabung dalam kepercayaan (religion) (Asih, 2016). Carter 1996 dalam Zamani dan Darmawan 2000, memberikan definisi sebagai : "A strategy for achieving a people-centered development where the focus of decision making with regard to the sustainable use of natural resources in an area lies with the people in the communities of that area" atau "Suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan di suatu daerah berada ditangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut".

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya. Dengan demikian pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat adalah pendekatan pengelolaan yang melibatkan kerja sama antara masyarakat setempat dan pemerintah dalam bentuk pengelolaan secara bersama dimana masyarakat berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan sampai pada pelaksanaannya. Pemikiran ini sangat didukung oleh tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir di Indonesia antara lain :

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha.
- Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan lautan.
- Peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan.
- Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan.

Dari beberapa tujuan tersebut di atas maka pemanfaatan secara optimal dan lestari adalah salah satu yang menjadi pertimbangan utama di dalam pengelolaan sumber daya. Pemanfaatan secara lestari hanya akan dicapai jika sumber daya dikelola secara baik, proporsional dan transparan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, alam, buatan dan sosial (Keraf, 2000). Pengembangan dan pengelolaan daerah pesisir di Indonesia bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah pusat

tetapi kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 yang memberikan kewenangan pada daerah dalam mengelola pesisir dan lautnya sejauh 12 mil untuk propinsi dan 1/3 untuk kabupaten (UU No. 22 tahun 1999).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik Cluster Random Sampling pada birokrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Timur, total sampel sebanyak 60 orang.

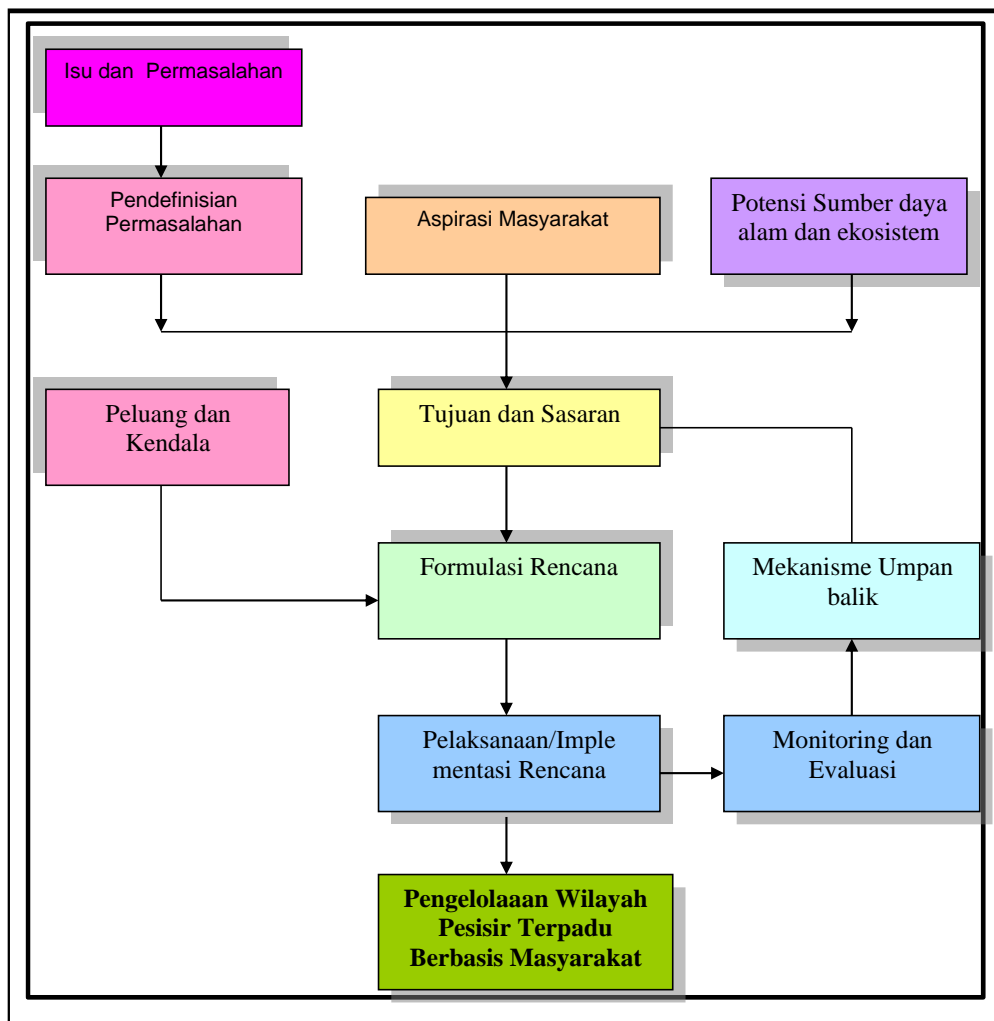
HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang berbasis masyarakat diperlukan beberapa proses pengelolaan yang sesuai dengan tahapan manajemen yaitu mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Tahapan proses perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat tetap mengacu kepada proses perencanaan pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir dan lautan dalam Gambar : 1.

Tahap Perencanaan

Tahap awal dari proses perencanaan adalah dengan cara mengidentifikasi dan mendefinisikan isu dan permasalahan yang ada, yang menyangkut kerusakan sumber daya alam, konflik penggunaan, pencemaran, dimana perlu dilihat penyebab dan sumber permasalahan tersebut. Selanjutnya juga perlu diperhatikan sumber daya alam dan ekosistem yang ada yang menyangkut potensi, daya dukung, status, tingkat pemanfaatan, kondisi sosial ekonomi dan budaya setempat seperti jumlah dan kepadatan penduduk, keragaman suku, jenis mata pencaharian masyarakat lokal, sarana dan prasarana ekonomi dan lain-lain. Berdasarkan pendefinisian masalah yang dipadukan dengan informasi tentang sumber daya alam dan ekosistem serta aspirasi masyarakat selanjutnya disusun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.



Gambar 1 Proses Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat
Sumber : Dahuri *et al* (2001) yang telah dimodifikasi

Kendala yang ada selanjutnya mulai dibuat perencanaan berupa kegiatan pembangunan dalam bentuk program dan proyek. Perencanaan yang telah disusun perlu disosialisasikan kembali kepada masyarakat luas untuk mendapat persetujuan, setelah mendapat persetujuan rencana ini baru dimasukkan dalam agenda pembangunan baik daerah maupun nasional.

Dalam penyusunan rencana pengelolaan ini, perlu juga diperhatikan bahwa konsep pengelolaan sumber daya pesisir terpadu berbasis masyarakat diharapkan akan mampu untuk (1) meningkatkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya SDA dalam menunjang kehidupan mereka (2) meningkatkan

kemampuan masyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan dan (3) meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan (Zamani dan Darmawan, 2000).

Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Rencana

Pada tahap implementasi perencanaan, diperlukan kesiapan dari semua pihak yang terlibat didalamnya, seperti masyarakat itu sendiri, tenaga pendamping lapangan dan pihak lainnya. Selain itu juga diperlukan koordinasi dan keterpaduan antar sektor dan *stakeholder* yang ada sehingga tidak terjadi tumpang

tindih kepentingan dan ego sektoral. Dalam hal ini diperlukan adanya lembaga pelaksana yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah Daerah, masyarakat lokal, Investor/swasta, instansi sektoral, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pada tahap implementasi ini juga diperlukan kesamaan persepsi antara masyarakat lokal dengan lembaga atau orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga masyarakat benar-benar memahami rencana yang akan dilaksanakan. Menurut Zamani dan Darmawan (2000) kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap implementasi ini adalah: (1) integrasi ke dalam masyarakat, dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk menjawab seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan penerapan konsep dan mengidentifikasi pemimpin potensial yang terdapat di lembaga masyarakat lokal. (2) pendidikan dan pelatihan masyarakat, metoda pendidikan dapat dilakukan secara non formal menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan cara tatap muka sehingga dapat diperoleh informasi dua arah dan pengetahuan masyarakat lokal (*indigenous knowledge*) dapat dikumpulkan untuk dimasukkan dalam konsep penerapan (3) memfasilitasi arah kebijakan, dalam hal ini segenap kebijakan yang berasal dari masyarakat dan telah disetujui oleh koordinator pelaksana hendaknya dapat didukung oleh pemerintah daerah,

sehingga kebijakan bersama tersebut mempunyai kekuatan hukum yang jelas, dan (4) penegakan hukum dan peraturan, yang dimaksudkan agar seluruh pihak yang terlibat akan dapat menyesuaikan tindakannya dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring yang dilakukan sejak dimulainya proses implementasi perencanaan dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas kegiatan, permasalahan yang timbul dalam implementasi kegiatan. Monitoring dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang ada. Setelah monitoring selanjutnya dilakukan evaluasi bersama secara terpadu dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Melalui evaluasi ini akan diketahui kelemahan dan kelebihan dari perencanaan yang ada guna perbaikan untuk pelaksanaan tahap berikutnya.

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat sesuai dengan prinsip Ko-manajemen perikanan yaitu pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya perikanan. Oleh sebab itu keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dapat mengacu kepada indikator keberhasilan Ko-manajemen perikanan. Menurut Dahuri *et al* (1998) Indikator keberhasilan Ko-manajemen adalah seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 Indikator Keberhasilan Ko-manajemen

Kriteria	Indikator	Cara Mengukur
Tingkat pendapatan	Peningkatan relatif pendapatan masyarakat lokal	Secara kuantitatif membandingkan pendapatan sebelum dan sesudah diterapkan Ko-manajemen. Tingkat inflasi harus diperhitungkan dengan melihat kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder
Pendidikan formal dan informal	Peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan formal dan informal	Perbandingan jumlah relatif lulusan masyarakat lokal dari pendidikan formal dan informal
Kesadaran masyarakat	Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga dan memelihara sumber daya alam	Semakin berkurangnya kegiatan yang bersifat merusak dan sebaliknya semakin banyak kegiatan yang menunjang kelestarian sumber daya alam

Motivasi	Meningkatnya motivasi masyarakat dalam proses pengelolaan	Semakin banyak usulan dan keinginan masyarakat yang disampaikan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan ko-manajemen dan semakin meningkatnya peranan masyarakat dalam proses-proses pengelolaan sumber daya alam
Kreativitas dan kemandirian	Meningkatnya bentuk dan variasi pemanfaatan sumber daya alam yang lestari oleh masyarakat	Jumlah dan variasi pemanfaatan sumber daya yang dilakukan masyarakat
Pengakuan hak	Diakuinya hukum tradisional atau masyarakat lokal dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam	Jumlah dan intensitas pelaksanaan aturan lokal dan tradisional
Program kemitraan	Terbentuknya program kemitraan dalam pemanfaatan sumber daya alam	Efisiensi dan intensitas program kemitraan dalam menunjang kegiatan masyarakat lokal

Sumber : Dahuri *et al* (1998)

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil analisis data dan temuan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan dalam upaya mengelola sumber daya di wilayah pesisir, yang cukup menjanjikan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Setidaknya ada 4 (empat) keuntungan yang didapatkan dalam pengelolaan berbasis masyarakat antara lain masyarakat ikut mengontrol sumber daya di sekitar mereka, dukungan yang luas dari masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang ada, ketersediaan data yang dibutuhkan dalam pemanfaatan sumber daya tersebut, pengelolaan sumber daya dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti merekomendasi hal-hal sebagai berikut perlu dorongan motivasi kepada masyarakat pesisir untuk terus menerus melakukan kontrol terhadap setiap pengelolaan wilayah pesisir, perlu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang ada disekitarnya, perlu penyediaan data secara sistimatis yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir, dan

perlu melibatkan masyarakat dalam pengolaan wilayah pesisir wilayah pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam Jurnal (Jurnal Primer)

Bengen, D.G. 2000. *Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem dan Sumber daya Pesisir* (Prosiding Pelatihan Untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Bogor 13-18 November 2000. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB).

_____. 2001. *Ekosistem dan Sumber daya Pesisir dan Laut Serta Pengelolaan Secara Terpadu dan Berkelanjutan* (Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Bogor 29 Oktober - 3 November 2001. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB).

_____. 2002. *Sinopsis Ekosistem dan Sumber daya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya*. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB.

Dahuri R., Rais Y., Putra S.G., Sitepu, M.J., 2001. *Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Dahuri, R. *et al*. 1998. " *Penyusunan Konsep Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Lautan yang Berakar dari Masyarakat*"

- Kerjasama Ditjen Bangda dengan Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan, IPB. Laporan Akhir.
- Fauzi. A. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Gordon, H.S., 1954. *The Economic Theory of a Common Property Resource: the Fishery*. Journal of Political Economics, 62 (2): 124 - 142.
- Kusumastanto, T., 2002. *Reposisi "Ocean Policy" Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Di Era Otonomi Daerah*. Orasi Ilmiah: Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Kebijakan Ekonomi Perikanan dan Kelautan, FPIK-IPB.
10. Nugroho, dkk. 2001. *Pengelolaan Wilayah Pesisir untuk Pemanfaatan Sumber daya Alam yang Berkelanjutan* (Peper Kelompok IV Mata Kuliah Falsafah Sain, IPB).
- Rais. Jacob. 2004. *Menata Ruang Laut Terpadu*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Asih, 2016. *Arahan Optimalisasi Fungsi Zona Taman Kota Di Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Berdasarkan Persepsi Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.
- Susilo, S.B. 1999. *Perencanaan Perikanan Nasional dengan Pendekatan Model dan Simulasi*. J. II. Pert. Indo. Vol. 8(2).
- Zamani, N.P dan Darmawan, 2000. *Pengelolaan Sumber daya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat*. Prosiding Pelatihan untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Bogor 21 - 26 Februari 2000. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB, Bogor.

Peraturan/Undang- Undang

- Departemen Kelautan dan Perikanan R.I, 2002. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. : Kep. 10/Men/2002 tentang *Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu*.